

**ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA***IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING AT THE REGIONAL DISASTER  
MANAGEMENT AGENCY IN THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI*

Oleh:

**Lani B. Reimassa<sup>1</sup>  
Jantje J. Tinangon<sup>2</sup>  
Anneke Wangkar<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[<sup>1</sup>lanibethania@gmail.com](mailto:lanibethania@gmail.com)[<sup>2</sup>janjantinangon@gmail.com](mailto:janjantinangon@gmail.com)[<sup>3</sup>annekelwangkar@gmail.com](mailto:annekelwangkar@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan pertanggungjawaban. Informan yang digunakan adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik (2) setiap aktivitas program yang dijalankan berkaitan dengan visi-misi (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan program dijabarkan sesuai yang dilakukan.

**Kata Kunci:** anggaran berbasis kinerja

**Abstract:** This research was conducted to determine the implementation of performance-based budgeting in the Regional Disaster Management Agency of North Sulawesi Province. This study uses a qualitative research approach. The data used are quantitative data in the form of accountability reports. The informant used was the Head of the Sub-Division of Planning and Finance of the Regional Disaster Management Agency of North Sulawesi Province. The results of this study indicate that: (1) Implementation of Performance Based Budgeting in the Regional Disaster Management Agency of North Sulawesi Province has been running well (2) Every program activity carried out is related to the vision and mission (3) Accountability for program implementation is described according to what is done.

**Keywords:** performance based budget

### Latar Belakang Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah di daerah baik dalam provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada menjalankan aktivitas pelayanan pada masyarakat berupa peningkatan mutu keamanan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Dalam menanggulangi bencana, ada 4 tahap penting yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu (1) tahap pencegahan (2) tahap tanggap darurat (3) tahap rehabilitasi, dan (4) tahap rekonstruksi.

Pada banyak kejadian, bencana alam sangat sulit untuk diprediksi terutama waktu kejadiannya, maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus selalu siap sedia dengan segala peralatan yang disiapkan. Anggaran dan program yang sudah dibuat bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja APBD dalam mengurangi risiko bencana alam dan memastikan semua masyarakat terjamin secara layak pada saat terjadi bencana alam, oleh sebab itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara berusaha agar program yang dijalankan bisa tepat sasaran dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik lebih baik. Hal ini sangat berkaitan dengan sistem keuangan yang terdapat dalam UU No. 17 tahun 2003 yaitu tentang Anggaran Berbasis Kinerja yang berorientasi pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dalam penyusunan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran untuk menjaga penyalahgunaan anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian diatas dan melihat pentingnya penggunaan anggaran dalam menjalankan program peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan mengangkat judul Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berdasarkan prestasi kerja yang ingin dicapai sesuai dengan visi-misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta kendala-kendala yang dialami.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Bachtiar, 2013)

### Anggaran

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode mendatang (Bastian 2015). Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial* (Mardiasmo, 2010).

### Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk penggunaan anggaran dalam pencapaian keluaran dan keberhasilan tersebut (Darise, 2010)

### Elemen-elemen Anggaran berbasis Kinerja

Elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 2008):

1. Visi dan misi  
Visi merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam waktu jangka panjang. Sedangkan misi merupakan gambaran bagaimana visi tersebut akan dicapai.
2. Tujuan  
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan digambarkan dalam RPJM nasional yang menunjukkan tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal.
3. Sasaran  
Sasaran merupakan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan dapat membantu penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Sasaran yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batas waktu.

## 4. Program

Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran *output* dan *outcome*.

## 5. Kegiatan

Kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* untuk pencapaian suatu program.

### Analisis Kinerja Penggunaan Anggaran

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja penggunaan anggaran salah satunya dengan menggunakan Rasio Efektivitas. Mardiasmo (2009), menyatakan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja

$$EFEKTIFITAS = \frac{REALISASI ANGGARAN BELANJA}{TARGET ANGGARAN BELANJA} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2009)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- Jika hasil perbandingan lebih dari 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- Jika hasil perbandingan lebih dari 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- Jika hasil perbandingan lebih dari 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- Jika hasil perbandingan lebih dari 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

### Penelitian Terdahulu

Reza, Nanda dan Darwanis (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan), dimana terdapat Sumber Daya Manusia yang belum optimal untuk menerapkan anggaran yang telah direncanakan.

Farwitawat (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau, dimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam APBD Tahun 2015 cukup baik meskipun mengalami kendala dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mandang (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Menunjang Akuntabilitas Publik pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado, dimana capaian kinerja keuangan atau alokasi anggaran dan realisasi anggaran cukup baik, yakni mencapai 94%.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan maksud menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diangkat peneliti serta menjabarkan pembahasan penelitian dengan kata-kata dan gambar atau tabel, bukan secara numerik atau angka

### Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2018 sampai bulan November 2018.

### Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari wawancara tentang penerapan anggaran berbasis kinerja dan data yang sudah ada berupa dokumen realisasi anggaran. sumber data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dalam hal ini wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### Metode dan Proses Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan maksud menjelaskan hasil penelitian ini dengan kata-kata yang sesuai dengan keadaan yang terjadi di tempat penelitian. Berikut adalah proses analisis yang akan di lakukan oleh peneliti:

1. Peneliti akan datang langsung ke objek penelitian untuk melakukan pengumpulan data berupa wawancara dan laporan pertanggung jawaban anggaran tahun 2017
2. Data kuantitatif diambil dari sub bagian keuangan dan perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara.
3. Dari data kuantitatif tersebut berikut adalah langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisa data:
  - a. Visi-Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara
  - b. Sasaran program dan kegiatan
  - c. Realisasi program
  - d. Kendala dalam menjalankan program.

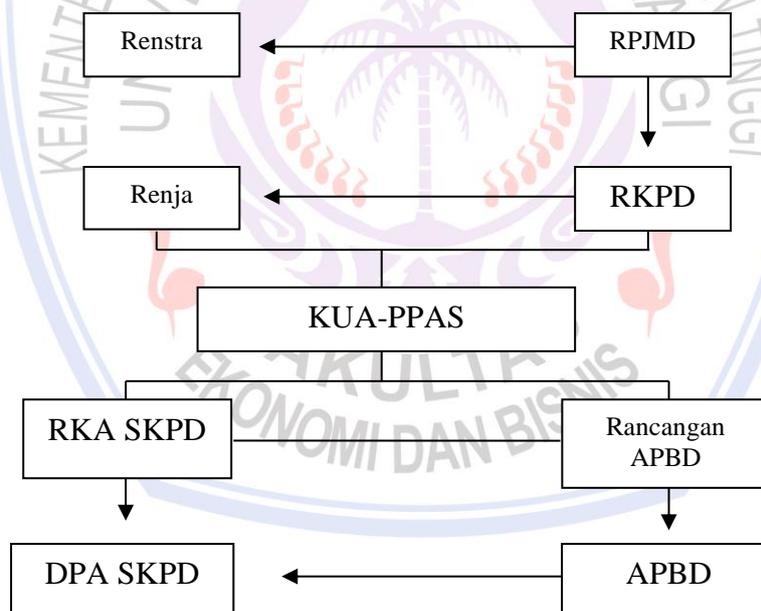
## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

#### Gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dengan tugas pokok; memberikan pedoman, pengarahan, menetapkan standarisasi dan kebutuhan, menyampaikan informasi kegiatan, melaporkan penyelenggaraan dan penanggulangan bencana, menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran, serta melaksanakan kewajiban lain serta menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008.

#### 1. Proses Perencanaan Anggaran



**Gambar 1. Proses Perencanaan Anggaran**

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Dalam perencanaan anggaran, tahap pertama yang dilakukan adalah menyusun RENSTRA (Rencana Strategi) untuk periode lima tahun. Kemudian di Setiap tahun di *breakdown* menjadi Rencana Kerja atau sering disingkat sebagai RENJA, yang memuat program dan kegiatan yang telah di konsultasi dengan publik dan di setuju oleh masyarakat, proses penyusunan di mulai pada bulan Februari. RENJA di tetapkan bersama dengan Rencana kerja Pemerintah Daerah oleh DPRD yang akan di kerjakan di tahun mendatang. Kemudian keluarlah KUA-PPAS, setelah anggaran di tetapkan di buatlah PAGU-Anggaran dan kemudian di *breakdown* di masing-masing program dan kegiatan dalam bentuk belanja. Kemudian masih di lakukan konsultasi sampai bulan November dan akan di sahkan awal Desember, sambil menunggu di sahkan nya anggaran di buatlah RKA. Setelah semuanya disahkan maka RKA berubah menjadi DPA.

Perencanaan anggaran diawali dengan FGD (*Focus Group Discussion*) yang menghadirkan semua masyarakat dan *stakeholder* untuk memberikan usulan yang disebut forum SKPD. Di forum SKPD semua memberikan usulan mengenai program dan kegiatan, meskipun semua mengajukan usulan tapi hanya beberapa yang di terima karena disesuaikan dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi). Kemudian dilanjutkan dengan RANWAL (Rancangan Awal) yang berisi seluruh program kegiatan dan anggaran. Setelah membuat RANWAL, kemudian menjadi KUA-PPAS setelah selesai kemudian selanjutnya menjadi RKA setelah melalui banyak proses perundingan dan konsultasi, baru keluarlah DPA yang ditetapkan dengan PERDA dan peraturan Gubernur.

## 2. Sinkronisasi Misi, Tujuan dan Saran

Melakukan sosialisasi tentang bencana alam di beberapa kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara serta melakukan update data daerah-daerah rawan bencana untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

## 3. Program Kerja

Berikut merupakan program kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
- 4) Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/kedaerahan
- 5) Program perencanaan skpd
- 6) Program perencanaan pengelolaan bencana terpadu
- 7) Program perencanaan penanggulangan bencana
- 8) Program pengurangan resiko bencana alam
- 9) Program kesiapsiagaan
- 10) Program peringatan dini
- 11) Program penguatan ketahanan sosial masyarakat
- 12) Program peningkatan kesadaran masyarakat
- 13) Program pengembangan masyarakat tangguh bencana
- 14) Program pengkajian darurat bencana
- 15) Program penentuan status bencana
- 16) Program penyelamatan dan evakuasi
- 17) Program penempatan pengungsi
- 18) Program perbaikan lingkungan daerah bencana
- 19) Program perbaikan prasarana dan sarana umum daerah bencana
- 20) Program pembangunan sarana dan prasarana sosial
- 21) Program pengendalian dan operasi penanggulangan bencana
- 22) Program pembangunan prasarana dan sarana umum
- 23) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (kewajiban)
- 24) Program pemulihan daerah bencana (kewajiban)
- 25) Program pembangunan sarana dan prasarana sosial (kewajiban)

## 4. Realisasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2017

Terdapat 14 program kerja yang dijalankan mencakup sosialisasi ke berbagai daerah, koordinasi pengelolaan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam.

**Tabel 1. Realisasi Anggaran 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
<b>1.</b>	<b>Program Perencanaan Pengelolaan Bencana Terpadu</b>	<b>301.402.164</b>	<b>298.982.462</b>
	Rapat Kerja Daerah Pengelolaan Bencana Terpadu	177.684.500	176.777.400
	Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Bencana Terpadu	99.762.664	98.792.262
	Pengumpulan Data dan Informasi Kebencanaan Terpadu	23.955.000	23.412.800
	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Bencana Terpadu	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Program Perencanaan Penanggulangan Bencana</b>	<b>63.069.000</b>	<b>27.445.750</b>
	Penyusunan Renkon	63.069.000	27.445.750
<b>3.</b>	<b>Program Pengurangan Resiko Bencana Alam</b>	<b>77.575.000</b>	<b>60.886.800</b>
	Pengembangan Budaya Sadar Bencana	19.185.000	17.860.800
	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana	58.390.000	43.026.000

<b>4.</b>	<b>Program Kesiap-siagaan</b>	<b>236.255.500</b>	<b>133.043.500</b>
	Operasional Posko Siaga Bencana	215.365.500	112.353.500
	Koordinasi Pelaksanaan Kesiap-siagaan	20.890.000	20.690.000
<b>5.</b>	<b>Program Peringatan Dini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pemanfaatan Media untuk Peringatan Dini	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Program Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat</b>	<b>69.280.000</b>	<b>62.490.500</b>
	Koordinasi Peringatan Bulan PRB	69.280.000	62.490.500
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat</b>	<b>45.456.000</b>	<b>45.006.000</b>
	Sosialisasi Pengenalan Resiko Bencana terhadap Anak-anak Sekolah	45.456.000	45.006.000
	Penerapan Sekolah Aman Bencana	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Program Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pelatihan tim relawan dalam penanggulangan bencana	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Program Pengkajian Darurat Bencana</b>	<b>10.890.000</b>	<b>10.649.000</b>
	Kaji Cepat Bencana	10.890.000	10.649.000
<b>10.</b>	<b>Program Penentuan Status Bencana</b>	<b>19.290.000</b>	<b>19.233.000</b>
	Koordinasi Penanganan Darurat	19.290.000	19.233.000
<b>11.</b>	<b>Program Penyelamatan dan Evakuasi</b>	<b>710.830.000</b>	<b>666.641.406</b>
	Pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	647.040.000	603.065.406
	Pelatihan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	63.790.000	63.576.000
<b>12.</b>	<b>Program Penempatan Pengungsi</b>	<b>39.080.000</b>	<b>35.905.000</b>
	Koordinasi penanganan darurat pengungsi	19.740.000	19.412.000
	Identifikasi lokasi darurat Pengungsian	19.340.000	16.493.000
<b>13.</b>	<b>Program Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana</b>	<b>1.474.021.000</b>	<b>1.426.551.000</b>
	Koordinasi teknis perbaikan lingkungan daerah bencana	0,00	0,00
	Rehabilitasi lingkungan daerah bencana	1.474.021.000	1.426.551.000
<b>14.</b>	<b>Program Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum Daerah Bencana</b>	<b>20.190.000</b>	<b>19.724.000</b>
	Koordinasi teknis perbaikan prasarana dan sarana umum daerah bencana	20.190.000	19.724.000
<b>15.</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial</b>	<b>10.801.883.500</b>	<b>10.763.748.500</b>
	Pembangunan Prasarana Sosial	10.801.883.500	10.763.748.500
<b>16.</b>	<b>Program Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana</b>	<b>8.930.000</b>	<b>8.928.500</b>
	Operasional Pengendalian dan Operasi	5.740.000	5.740.000
	Dokumentasi dan Publikasi Informasi Bencana	3.190.000	3.188.500
	Bimbingan Teknis Sistem dan Informasi Kebencanaan	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum</b>	<b>25.895.500.000</b>	<b>23.929.309.099</b>
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum Daerah	15.000.000.000	14.987.615.244
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	250.000.000	242.303.555
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	10.645.500.000	8.699.390.300
<b>18.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kewajiban)</b>	<b>39.875.000</b>	<b>0,00</b>
	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Kewajiban)	39.875.000	0,00
<b>19.</b>	<b>Program Pemulihan Daerah Bencana (Kewajiban)</b>	<b>39.730.000</b>	<b>0,00</b>
	Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik di Daerah Pasca Bencana (Kewajiban)	39.730.000	0,00
<b>20.</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial (Kewajiban)</b>	<b>51.270.950</b>	<b>0,00</b>
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Sosial (Kewajiban)	51.270.950	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>43.427.342.619</b>	<b>40.956.838.783</b>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2017

Tabel diatas menggambarkan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada setiap program. Dapat dilihat ada beberapa program yang realisasi anggarannya 0, bapak Edwin Monding menjelaskan bahwa program tidak bisa dilaksanakan karena pihak ke-3 (kontraktor) tidak melakukan pencairan dana. Jadi untuk anggaran yang tidak dimanfaatkan tersimpan di Kas Umum Daerah yang disebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau *SILPA*.

### 5. Kendala Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Sistem anggaran berbasis kinerja pada saat ini tidak mengalami kendala, namun dapat dilihat dalam realisasi anggaran terdapat beberapa program yang tidak terlaksana. Faktor ini menyebabkan anggaran tidak dapat digunakan, anggaran yang tidak dimanfaatkan akan tetap tersimpan di Kas Umum Daerah yang sering disebut sebagai *SILPA* atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

### Pembahasan

#### Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sebelum adanya anggaran berbasis kinerja, pemerintah menggunakan anggaran tradisional, yaitu proses penganggaran yang hanya berdasarkan besarnya realisasi anggaran sebelumnya, yang membuat anggaran tidak terserap dengan baik dan untuk merencanakan anggaran di tahun berikutnya tidak ada perubahan yang mendasar yang menjadi acuan agar program di tahun berikutnya bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, ini sangat bertolak belakang sekali dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penelitian terdahulu oleh Anton, Gabriel, Mandang (2016) penyusunan harus meliputi kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Prosedur-prosedur yang digunakan dalam penyusunan anggaran sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah yaitu Permandagri Nomor 86. Dengan berdasarkan visi-misi dan masukan dari masyarakat, maka program-program yang di buat oleh BPBD adalah program yang membantu mensejahterakan masyarakat karena dalam perencanaan penyusunan program dan anggaran BPBD melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapat yang menjadi kebutuhan mereka. BPBD akan menyaring semua masukan masyarakat, menganalisa apakah masukan tersebut sesuai dengan TUPOKSI yang ada. Penyusunan anggaran lebih mudah dengan adanya masukan pendapat dari masyarakat sehingga program dan anggaran yang di rencanakan dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak ada anggaran yang tidak terpakai atau ada anggaran yang terpakai tapi tidak menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang praktis namun strategis yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi BPBD Provinsi Sulawesi Utara agar dalam pelaksanaannya mampu mensejahterakan masyarakat. Selain Renja, Renstra juga menjadi dokumen penting karena menjadi pedoman agar pelaksanaan program tetap konsisten dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dalam penyusunan Renja didasarkan pada pengkajian faktor-faktor internal dan eksternal yang member arah pada penentuan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan juga alokasi sumber daya untuk mencapai hasil yang baik. Seperti yang di kemukakan oleh Darise (2010), bahwa anggaran berbasis kinerja lebih memperhatikan hasil yang akan di dapatkan setelah menjalankan program. Program akan di katakana efisien dan efektif jika realisasi program mencapai target yang telah di tentukan. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, membuat penyusunan anggaran semakin mudah. Selain itu dampak positif lain yang di timbulkan adalah tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran karena sistem penyusunan dan pelaporan sangat transparan. Jika ada program yang mengalami kekurangan atau kelebihan anggaran, maka anggaran lebih tersebut akan dipindahkan ke program yang mengalami kekurangan anggaran. Jadi anggaran tersebut dirubah peruntukannya, ini disebut dengan APBD perubahan.

APBD perubahan dilakukan sekali dalam setahun dan dilaksanakan pada pertengahan tahun. Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu, terdapat beberapa catatan yang akan mendasari penganggaran perubahan APBD, contohnya sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, antara lain dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.

Pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan program kegiatan yang kebanyakan melakukan pembangunan kembali atau rekonstruksi daerah-daerah yang rusak akibat bencana alam di berbagai daerah yang termasuk dalam Provinsi Sulawesi Utara, setiap program kegiatan yang dilaksanakan diperinci dalam realisasi pelaksanaan program kegiatan dengan menyertakan realisasi anggaran atau penggunaan anggaran saat melaksanakan program dan kegiatan. Dari hasil laporan realisasi program kegiatan tersebut dapat disimpulkan pencapaian sasaran secara fisik sudah sepenuhnya terealisasi, dapat dilihat dari rincian realisasi program yang sudah sesuai dengan uraian program kegiatan. Adapun beberapa program yang tidak bisa dijalankan karena dari pihak ketiga (kontraktor) tidak melakukan proses pencairan dana, sehingga anggaran yang tidak dimanfaatkan tersimpan di Kas Anggaran Umum Daerah yang disebut sebagai *SILPA* atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Pengukuran efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

#### Analisis Efektivitas

Menganalisis efektivitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran.

$$EFEKTIVITAS = \frac{REALISASI ANGGARAN BELANJA}{TARGET ANGGARAN BELANJA} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{40.956.838.783}{43.427.342.619} \times 100\% = 94,31\%$$

Dari hasil perhitungan yang didapat, dapat dilihat bahwa pencapaian efektifitas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencapai sebesar 94,31%. Dalam perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, dalam kategori 90%-100% anggaran belanja dikatakan efektif. Dapat diartikan bahwa pencapaian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diterapkan secara keseluruhan pada tahun 2008, tujuan di terapkannya Anggaran Berbasis Kinerja adalah untuk memanfaatkan anggaran sebaik mungkin dan mendapatkan hasil dari penggunaan anggaran. Berdasarkan pembahasan yang telah di sajikan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses perencanaan anggaran harus melewati proses yang sangat ketat agar anggaran dan program yang dijalankan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah di tentukan.
2. Dengan adanya anggaran berbasis kinerja pemanfaatan anggaran dapat berjalan sesuai dengan TUPOKSI yang sudah ada di masing-masing bidang.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah diupayakan agar berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

### Saran

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diterapkan secara keseluruhan pada tahun 2008, tujuan di terapkannya Anggaran Berbasis Kinerja adalah untuk memanfaatkan anggaran sebaik mungkin dan mendapatkan hasil dari penggunaan anggaran. Berdasarkan pembahasan yang telah di sajikan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses perencanaan anggaran harus melewati proses yang sangat ketat agar anggaran dan program yang dijalankan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah di tentukan.
2. Dengan adanya anggaran berbasis kinerja pemanfaatan anggaran dapat berjalan sesuai dengan TUPOKSI yang sudah ada di masing-masing bidang.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah diupayakan agar berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. 2013. *Tujuan Akuntansi Pemerintahan*. Erlangga. Jakarta.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. *Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Darise, N. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT INDEKS. Jakarta.
- Farwitawati. 2016. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 13 No. 2. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/853> (Diakses pada 21 Juni 2018)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF. Yogyakarta.
- Mandang. 2016. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 4 No.3 Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14289> (Diakses pada 21 Juni 2018)
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nanda. 2016. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 1 No. 1. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/778> (Diakses pada 21 Juni 2018)